



KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAMBI

Jl. Jend. A. Yani No.13 Telp. (0741) 60849 – 63214 Fax. (0741) 60808  
Telanaipura Jambi 36122

Nomor : B-280/Kw.05.1/1/KU.00/1/2021  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 lembar  
Perihal : Penyampaian Renja Kementerian Agama  
Tahun Anggaran 2022

15 JAN 2021

Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota  
Se- Provinsi Jambi

Berdasarkan surat Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI Nomor : B-60/SJ/B.I.2.3/KU.00/1/2021 tanggal 12 Januari 2021 perihal Penyusunan Renja Tahun 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal berikut:

- a. Penyusunan Renja K/L Tahun Anggaran 2022 sebagaimana jadwal yang telah ditentukan oleh Kementerian PPN/Bappenas berakhir pada bulan Maret 2021;
- b. Penyampaian dokumen usulan Pagu Indikatif Tahun 2022 disampaikan dalam bentuk *Softcopy* melalui *E-Planning 2.0* Kementerian Agama RI paling lambat tanggal 5 Februari 2021;
- c. Dokumen usulan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022 yang diinput ke dalam Aplikasi *E-Planning 2.0* dilengkapi dengan data pendukung yang diperlukan, antara lain:
  1. Surat usulan anggaran yang sudah ditandatangani pimpinan masing-masing;
  2. *Term of reference* (TOR) kegiatan/pengadaan;
  3. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/pengadaan;
  4. Kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Rehabilitasi Gedung:
    - a. Rekomendasi dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR) Dinas PU setempat (*menyatakan persentase kerusakan dan termasuk dalam rehab ringan/ sedang/ berat*);
    - b. Usulan/penetapan RKBMN (*dapat berkoordinasi dengan Biro Keuangan BMN*)
  5. Kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Pengadaan Tanah:
    - a. Standar harga pasar yang dikeluarkan camat;
    - b. Pernyataan jual dari pemilik tanah hak milik yang mencantumkan nilai jual per M<sup>2</sup>;
    - c. Photocopy AJB/sertifikat;
    - d. Surat pernyataan tidak sengketa dari lurah;
    - e. Surat Pernyataan Pemilik bahwa tanah tersebut tidak dijadikan agunan.
  6. Kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Pengadaan Gedung:
    - a. Rekomendasi dari Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR)/Dinas PU setempat (*mencantumkan persetujuan perhitungan RAB*);
    - b. RKBMN (*dapat berkoordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN*);
    - c. BMN *Idle*;
    - d. PMA Pembentukan Satker;

- e. AMDAL untuk luas tanah  $\geq 5$  ha dan Luas Bangunan  $\geq 10$  rb m<sup>2</sup>;
  - f. Peraturan Daerah setempat tentang Bangunan atau Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, atau Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) untuk lokasi tanah;
  - g. Status kepemilikan tanah rencana lokasi pembangunan;
  - h. Ijin pembangunan Gedung kantor baru dari Presiden RI;
7. Kelengkapan Dokumen Pendukung Usulan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;
- a. RKBMN (dapat koordinasi dengan Biro Keuangan dan BMN);
  - b. Risalah Lelang;
  - c. SK Penghapusan (jika sudah ada);
  - d. Surat Pernyataan tidak memiliki kendaraan dinas jabatan atau surat Pernyataan Alih Fungsi Kendaraan dari kendaraan dinas menjadi kendaraan operasional ditandatangani Kepala Satker;
  - e. Rekapitulasi data BMN kendaraan dengan mencantumkan kondisi kendaraan (rusak, ringan, sedang dan berat);
8. Proses usulan anggaran Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran *juncto* Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
9. Proses Usulan Anggaran Tahun 2022 khusus Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan BMN *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Alat Angkutan Darat Dinas Bermotor Operasional Jabatan dalam Negeri.

Demikian kami sampaikan agar dapat segera ditindaklanjuti. Atas perhatian dan kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.



Muhamad  
NIP. 196210291987031001

Tembusan  
Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI



**JADWAL PENYUSUNAN RENCANA KERJA KEMENTERIAN AGAMA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022																	
		DES	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOV	DES					
1	Kick Off Penyusunan Renja K/L Bappenas																		
2	Perbaikan Dokumen Perencanaan dalam Aplikasi Krisna (Sasaran, Arah Kebijakan, dan Prioritas Pembangunan Nasional Kementerian Agama)																		
3	Sidang Kabinet																		
4	Penyusunan Pagu Indikatif TA 2022 Kementerian Agama melalui Aplikasi E Planning 2.0																		
5	Rancangan Awal RKP serta SEB Menkeu dan Kepala Bappenas tentang Penetapan Pagu Indikatif K/L TA 2022																		
6	Musrenbangnas dan Penyampaian Rancangan Renja 2022																		
7	Rancangan RKP dan Raker pendahuluan dengan Komisi VIII DPR RI																		
8	Perpres RKP serta SEB Menkeu dan Kepala Bappenas tentang Penetapan Pagu Anggaran K/L TA 2022																		
9	Trilateral Meeting I																		
10	Trilateral Meeting II dan Pemutakhiran Rancangan Renja																		
11	Raker Pembahasan Renja Kementerian Agama dengan Komisi VIII DPR RI																		
12	Penetapan Alokasi Anggaran dan APBN oleh DPR RI dan SEB Menkeu dan Kepala Bappenas tentang Penetapan Alokasi Anggaran K/L TA 2022																		
13	Perubahan Renja Kementerian Agama dan Trilateral Meeting Perubahan Renja K/L																		
14	Pemutakhiran RKP dan DIPA Kementerian Agama																		